

Peletakan Dapur: Bentuk Ketertiban dalam Ketidakteraturan pada Kampung Kota

Farrah Eriska Putri¹, Adinda Christina¹

¹ Departemen Arsitektur, Universitas Indonesia.

Email Korespondensi: Farrah.eriska@ui.ac.id

Diterima: 24-05-2022

Direview: 31-10-2022

Direvisi: 07-12-2022

Disetujui: 19-12-2022

ABSTRAK. Secara umum, hunian informal pada Kampung Kota sering mengalami adaptasi dan perubahan untuk mengakomodasi kegiatan penghuninya. Masyarakat pada permukiman informal secara alamiah mengubah atau menambahkan ruang pada huniannya tanpa adanya aturan baku yang mengikat, hal ini kerap memunculkan ketidakteraturan dan kekacauan dalam tatanan ruang. Pada kasus Kampung Muka, adaptasi ruang yang bebas semacam ini juga terjadi. Namun dalam beberapa hal seperti perletakan dan penambahan ruang servis ditemukan kecenderungan yang seragam pada pola adaptasi ruangnya. Masyarakat seolah memiliki aturannya sendiri dalam menata ruang servis, seperti dapur pada bagian luar hunian mereka. Adanya aturan atau kesepakatan yang muncul di masyarakat ini sangat menarik untuk didalami, mengingat masyarakat informal cenderung dianggap bebas dari aturan. Memahami fenomena kemunculan aturan yang mengikat adaptasi ruang kemudian menjadi penting, untuk melihat sejauh apa batasan dan fleksibilitas yang bisa diterapkan pada hunian padat penduduk dan masyarakat yang datang dari lingkungan informal. Studi ini menggunakan metode pengumpulan data kualitatif berupa observasi terhadap perletakan spasial ruang dan kegiatan, serta *interview* mendalam terhadap responden. Pada akhirnya, studi berhasil mengidentifikasi bagaimana terjadinya dapur sebagai bentuk adaptasi ruang, serta faktor yang secara tersirat mengaturnya seperti luasan hunian, posisi hunian terhadap jalan, alasan keamanan, pertimbangan sirkulasi publik, dan kebutuhan penanda usaha. Sikap fleksibel masyarakat mengenai aturan ruang milik pribadi dan ruang publik, menunjukkan bahwa masyarakat perlu dilibatkan dalam perencanaan untuk meningkatkan efektifitas ruang hunian dan ruang publik.

Kata kunci: Permukiman Informal, Adaptasi Ruang, Adaptasi Dapur, Kampung Kota, *Home-based Enterprise*

ABSTRACT. *In general, informal settlements in Urban Kampung often went through adaptations and changes to accommodate the activities of their residents. The residents in informal settlements naturally change or add spaces to their dwellings without any binding rules, this often creates disorder and chaos in the spatial arrangement. In the case of Kampung Muka, this kind of independent space adaptation also occurs. However, in several cases, such as the placement and addition of service area, a consistent trend was found in the pattern of spatial adaptation. The residents seem to have their own rules in arranging service area, such as the kitchen on the outside of their dwelling. The existence of rules or agreements that appear in this community is very interesting, considering that informal communities tend to be considered exempt from rules. Understanding the emergence of rules that bind spatial adaptation then becomes important to see how far the limits and flexibility can be applied to densely populated housing especially to residents from informal environments. This study uses qualitative data collection methods in the form of observations of the spatial placement of spaces and activities, as well as in-depth interviews with respondents. In the end, the study succeeded in identifying how the kitchen as a form of spatial adaptation and the implied rules that accompany it.*

Keywords: *Informal Settlement, Spatial Adaptation, Kitchen Adaptation, Urban Kampung, Home-based Enterprise*

PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu, jumlah populasi dunia yang pindah ke dalam ruang urban dari rural meningkat setiap tahunnya. Jumlah yang terus

meningkat ini diproyeksikan akan menambah hingga 2,5 juta penduduk di daerah urban pada 2050 (UN/DESA, 2018). Para masyarakat urban ini tidak semuanya dapat hidup secara layak. Sebagian besar masyarakat urban harus bertahan dalam lingkup informal. Pada tahun 2015, sekitar 25% populasi dunia tinggal di dalam ruang informal, jumlah ini diperkirakan meningkat hingga mencapai angka 68% pada tahun 2050 (UN/DESA, 2018; UN-Habitat, 2016). Hunian informal akan selalu ada dan tidak dapat dipisahkan dari proses urbanisasi. Keberadaan hunian informal menandakan bahwa urbanisasi selalu membawa ketimpangan dalam aspek sosial dan ekonomi (UNESCAP, 2015). Ketimpangan ini kemudian memaksa mereka bergantung tidak hanya pada hunian informal, namun juga pada kegiatan ekonomi informal.

Seiring dengan laju urbanisasi yang kian pesat, berbagai sektor ekonomi informal ikut tumbuh dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu sub-sektor ekonomi informal yang marak terjadi adalah *Home-based enterprise* (HBE) (Ezeadichie, 2012). HBE secara harfiah dapat diartikan sebagai usaha berbasis rumah. Tipple (2005a) secara gamblang mengklasifikasikan bahwa segala bentuk aktivitas ekonomi yang dilakukan di hunian, dan bukan di lingkungan khusus komersil, dapat dikategorikan sebagai HBE. Pendapat ini senada dengan Lawanson (2012) yang menyatakan bahwa HBE merupakan sebuah kegiatan ekonomi yang menggunakan rumah sebagai basis kegiatannya. Kegiatan ekonomi dapat dilakukan oleh individu ataupun dengan melibatkan pekerja. Pada negara-negara berkembang, kegiatan ekonomi informal seperti ini merupakan hal yang lazim (Tipple, 2005b), dengan terbatasnya kemampuan ekonomi dan masalah minimnya lapangan pekerjaan, banyak masyarakat berpenghasilan rendah pada akhirnya menggantungkan kelangsungan hidup rumah tangganya sepenuhnya pada keberadaan HBE (Mpembamoto et al, 2017; Tipple, 2005b; Gough et al, 2003). Dengan demikian, rumah tidak lagi berfungsi tunggal hanya untuk hunian, tetapi juga mengakomodasi HBE.

Dalam prakteknya, keberadaan HBE membutuhkan ruang fisik untuk mewadahi kegiatan domestik dan

komersilnya, sedangkan ruang pada hunian sangat terbatas. Pemilik rumah pada akhirnya harus memanfaatkan ruangan yang ada dalam hunian dengan semaksimal mungkin. Hal ini kemudian mendorong penghuni untuk menghasilkan berbagai adaptasi meruang yang luwes dan menarik dalam mewadahi kegiatan HBE yang mereka lakukan di rumahnya. Beberapa perubahan yang kerap terjadi seperti pengurangan atau penambahan partisi dan mengatur ulang alokasi fisik ruang hunian, hingga membangun ruang baru sebagai ekstensi hunian. (Huba & Johannes, 2015). Penghuni HBE akan mengubah dan memodifikasi huniannya sebagai ruang untuk mendatangkan pemasukan, walaupun tidak serta merta memperbaiki kualitas rumah, namun ruang hunian akan dapat mewadahi kegiatan HBE (Adianto & Gabe, 2020).

Studi terkait HBE dan adaptasi ruangnya telah banyak dilakukan, salah satunya oleh Marsoyo (2012) yang mempelajari aspek dan elemen yang ada dalam hunian dengan HBE. Marsoyo (2012) menyimpulkan terdapat tiga strategi meruang yang dilakukan penghuni hunian dengan HBE. Ketiga strategi adaptasi meruang yang dilakukan penghuni tersebut adalah *adaptation strategy by sharing*; *adaptation strategy by extending*; dan *adaptation strategy by shifting*. Dari ketiga adaptasi ini, perubahan ruang tidak hanya dilakukan penghuni di dalam rumah, namun juga terjadi pada lingkungan luar rumah. Pada jenis adaptasi *by extending*, ditemukan bahwa penghuni menggunakan area luar hunian untuk diklaim sebagai bagian hunian mereka.

Perubahan-perubahan yang dilakukan seperti itu dianggap sebagai hal yang wajar. Pada hunian-hunian informal, transformasi hunian melalui perubahan dan adaptasi fisik hunian dalam skala kecil memang kerap dilakukan untuk memenuhi kebutuhan penghuni (Jones, 2021). Informalitas ini menunjukkan kurangnya kontrol dalam pembangunan, sehingga akhirnya hunian informal seringkali dianggap selaras dengan kekacauan dan ketidakteraturan (Dovey, 2012). Adanya adaptasi hunian dan pembangunan oleh penghuni menjadikan hunian informal makin tidak teratur. Bentuk ruang spasial yang ada di permukiman informal yang dianggap tidak teratur dan kacau ini

bahkan seringkali dianggap sebagai masalah (Jones, 2019).

Namun, di tengah kekacauan sebuah permukiman informal dapat pula ditemukan bentuk tertib dan aturan. Aturan yang ada di lingkungan informal ini terus berkembang dan beradaptasi, diikuti oleh para penghuninya dalam memodifikasi ruang hunian untuk memenuhi kebutuhan mereka (Suhartini & Jones, 2020). Pada kasus Kampung Muka, ditemukan juga adanya keteraturan dalam ketidakteraturan pembangunan hunian informalnya. Hal ini terlihat jelas pada perletakan ekstensi fungsi servis pada hunian. Warga Kampung Muka secara kompak meletakkan dapur di bagian luar hunian mereka dan mengubah lorong jalan menjadi bagian dari hunian mereka, seolah ada peraturan yang mengatur keberadaan ruang ini. Tulisan ini bertujuan untuk memahami munculnya fenomena peraturan adaptasi ruang dapur tersebut dan sejauh apa batasan serta fleksibilitas dalam penerapannya.

METODE



Gambar 1. Posisi Kampung Muka
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2022

Studi berfokus pada hunian dengan HBE yang terdapat di area Kampung Muka. Kampung ini merupakan salah satu kampung terpadat di area JABODETABEK. Lokasi tepatnya berada di Jakarta Utara, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, RW 04. Kampung ini berbatasan langsung dengan Anak Kali Ancol di Bagian Barat, Anak Kali Ciliwung di Bagian Timur, Jalan Gunung Sahari di bagian Utara, serta Jalan Mangga Dua Raya di bagian selatan. Dari batas kampung dapat dilihat bahwa kampung ini merupakan daerah yang strategis di antara pusat perniagaan terpadu. Kepemilikan

lahan Kampung Muka, menurut *stakeholder* setempat, secara keseluruhan masih abu-abu, warga tidak memiliki dasar legalitas atas tanah dan huniannya. Pada sebagian lahan kampung ini, kepemilikan dimiliki oleh beberapa perusahaan dengan tipe kepemilikan berupa hak guna lahan. Secara peruntukannya, lahan dimana kampung ini berdiri sebenarnya diperuntukkan sebagai penunjang dari kegiatan perniagaan, mengingat lokasi Kampung Muka terletak di dalam zona Pusat Niaga Terpadu Mangga Dua.

Kampung Muka dibagi menjadi 6 RT, namun uniknya RT 9 dibagi menjadi enam blok sehingga Kampung Muka secara umum terbagi menjadi 12 area yaitu RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5, RT 9A, RT 9B, RT 9C, RT 9D, RT 9E, dan RT 9F. Kepadatan tiap RT beragam mulai dari terendah di RT2 sejumlah 106.9 orang/HA, hingga tertinggi di RT 9 Blok A dengan 1,466 orang/HA. Data ini didapatkan dari sensus yang dilakukan RW Kampung Muka. Namun menurut Badan RW tersebut, kepadatan dalam lapangan diasumsikan jauh lebih tinggi daripada data formal, dikarenakan banyak penghuni yang tinggal tanpa melapor kepada aparat setempat. Data dari BPS pun tidak bisa dijadikan acuan dalam mengukur kepadatan kampung ini. Secara umum, kepadatan dan luas administratif Kampung Muka melebihi rata-rata kampung kota lainnya. Kepadatan penduduk dan luas administratif yang tinggi serta posisinya yang berada dalam pusat perniagaan terpadu membuat keberadaan ekonomi informal, termasuk HBE, menjadi sangat signifikan. Alasan tersebut melatarbelakangi dipilihnya Kampung Muka sebagai lokasi penelitian.

Studi ini dilakukan dalam rentang waktu kurang lebih delapan bulan dan diawali dengan pengumpulan data dan observasi awal. Data pada tahapan awal ini, salah satunya didapatkan dari studi literatur mengenai HBE dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan artikel media. Studi literatur dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai HBE sebagai persiapan dalam mengidentifikasi HBE di lapangan. Setelah dilakukan studi literatur, ditemukan beberapa pengertian dasar sebagai kerangka acuan kerja. Pengertian paling utama adalah mengenai arti HBE, serta apa saja yang dikategorikan sebagai HBE

dalam tulisan ini, mengacu kepada definisi dan kategorisasi dari Tipple (2005a) *processed food*, *daily goods*, *rented room*, *service*, dan *raw food*. Kemudian, untuk kategori HBE akan disesuaikan dengan kondisi HBE yang ditemukan di lapangan untuk mempermudah lingkup pengelompokan HBE yang ada di Kampung Muka. Setelah tahapan awal dilakukan, proses studi dilakukan dengan mengumpulkan data primer berupa foto, sketsa hunian, data demografi, dan tipe HBE. Tipe-tipe dari HBE yang ditemukan saat dilakukan survei lapangan berupa kegiatan ekonomi yang terlihat secara jelas seperti pengolahan makanan, kelontong, penyediaan jasa, dan penjual bahan mentah.

Dari proses pengumpulan data yang sudah dilakukan, ditemukan bahwa ada beberapa tipe HBE di Kampung Muka, kemudian pada studi ini difokuskan pada *processed food*, *daily goods*, *service*, dan *raw food*. *Processed food* adalah usaha HBE yang menjual makanan yang telah diolah seperti menjual cemilan, makanan, lauk-pauk dan usaha warteg. *Daily goods* merupakan jenis HBE dimana komoditas yang dijual berupa barang-barang yang dipakai sehari-hari. Jenis HBE ini berupa toko kelontong dan warung-warung. Ketiga adalah *service* dimana pelaku menawarkan jasa servis seperti servis elektronik, dan terakhir adalah *raw food* dimana barang yang dijual adalah produk pangan basah seperti daging, ikan, dan sayur-mayur. Selanjutnya, penelitian difokuskan pada hunian dengan tipe HBE *processed food*.

Pada tahap lanjutan dilakukan pengambilan data dengan cara penggambaran sketsa denah rumah beserta perabotnya sebagai penanda aktivitas dan ruang gerak kegiatan dalam hunian. Hasil dari observasi terhadap warga dan huniannya ini menghasilkan gambaran awal terhadap strategi meruang penghuni. Gambaran awal ini menjadi acuan saat melakukan wawancara terstruktur terhadap responden. Informasi yang didapatkan pada wawancara ini mengungkap kebiasaan-kebiasaan penghuni dalam kegiatannya meruang sehari-hari di area dapurnya, juga untuk mengungkap alasan dan pertimbangan warga terkait posisi dapur terhadap huniannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan mendasar yang muncul adalah hunian di Kampung Muka seringkali tidak menyediakan fasilitas dapur. Pada mayoritas kasus, hunian di kampung ini hanya berupa ruangan kosong dengan atau tanpa sekat, tidak ada dapur maupun kamar mandi. Padahal, keberadaan fasilitas dapur untuk mengolah makanan merupakan sebuah urgensi. Apalagi banyak rumah tangga yang menggantungkan hidupnya dengan HBE berupa pengolahan makanan, maka keberadaan dapur merupakan hal yang tidak bisa ditawar. Dalam mewadahi kegiatan pengolahan makanan ini, warga pada akhirnya dituntut kreatif memanfaatkan ruang yang ada. Seperti yang dibahas sebelumnya terdapat banyak strategi warga dalam menyiasati ruang terbatas dalam mewadahi aktivitas domestik maupun komersialnya, seperti tiga strategi adaptasi yang dikemukakan oleh Marsoyo (2012), yaitu: *adaptation strategy by sharing*; *adaptation strategy by extending*; dan *adaptation strategy by shifting*.

Adaptation strategy by sharing muncul ketika ruang domestik pada rumah juga dimanfaatkan penghuni untuk mewadahi kegiatan ekonomi atau HBE. Penerapan adaptasi ini apabila satu ruangan dibagi menjadi dua untuk kegiatan yang berbeda, sebagian untuk kegiatan domestik, sebagian untuk komersil. *Adaptation strategy by shifting* adalah adaptasi yang terjadi saat pemilik hunian melakukan kegiatan domestik dan ekonomi/HBE secara bergantian, namun pada ruangan yang sama. Terakhir adalah *adaptation strategy by extending*, yaitu strategi adaptasi meruang yang dilakukan penghuni dengan menambahkan ruang, baik untuk kegiatan domestik maupun kegiatan ekonomi HBE. Dari observasi dan wawancara yang dilakukan secara umum tidak ada aturan khusus yang berlaku pada masyarakat dalam melakukan adaptasi ini, warga hanya menggunakan apa yang mereka rasa sesuai dan praktikal bagi huniannya.



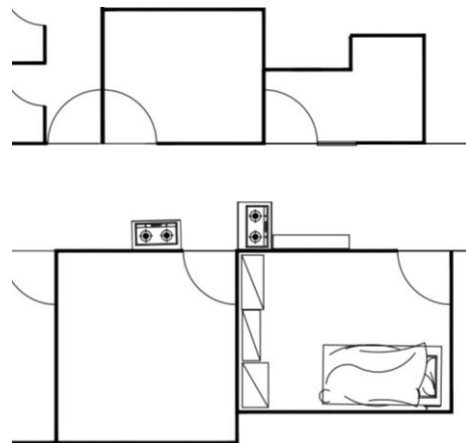
Gambar 2. Perletakan Dapur di depan Hunian
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2019



Gambar 3. Okupasi Lorong kampung
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2019

Hal yang menarik ditemukan pada Kampung Muka adalah dalam melakukan adaptasi berjenis *adaptation strategy by extending*, ruangan yang ditambahkan hampir selalu berupa dapur dan/atau ruang penyimpanan barang. Saat menelusuri Kampung Muka, pada banyak kasus, warga meletakkan dapurnya di depan rumah mereka. Sepanjang lorong yang merupakan ruang publik, dapat ditemukan dapur-dapur yang seolah dengan sengaja kompak diletakkan di depan huniannya. Tanpa adanya aturan dan panduan jelas terkait pembangunan kampung informal ini, warga secara tanpa sadar membuat kesepakatannya sendiri, sehingga memunculkan keseragaman dan keteraturan secara alami.

Pada studi ini berhasil mengidentifikasi alasan-alasan yang menjadikan warga kompak mengokupasi jalanan publik dan meletakkan dapur di bagian luar rumahnya. Alasan ini pula pada akhirnya berperan menjadi semacam aturan dan acuan bagi warga. Alasan pertama dan yang menjadi faktor terbesar adalah keterbatasan ruang dalam hunian yang tidak mengizinkan warga untuk menambahkan fungsi lain di dalam huniannya. Alasan ini kerap terjadi pada hunian yang memiliki luasan cenderung kecil, memaksakan meletakkan dapur di dalam hunian akan menghabiskan banyak ruang dan menghalangi dilakukannya kegiatan lain. Pada contoh kasus di gambar 4, yang ditemukan pada responden pertama, dapat dilihat pada denah hunian yang hanya berupa satu ruang kecil. Ruangan ini hanya cukup untuk memasukkan furnitur dalam jumlah terbatas dan tidak memungkinkan lagi menambahkan fungsi dapur dalam hunian, walaupun penghuni sangat membutuhkan dapur. Penghuni kemudian meletakkan peralatan dapur di luar rumah dan mengokupasi sebagian jalanan untuk menjadi dapur.

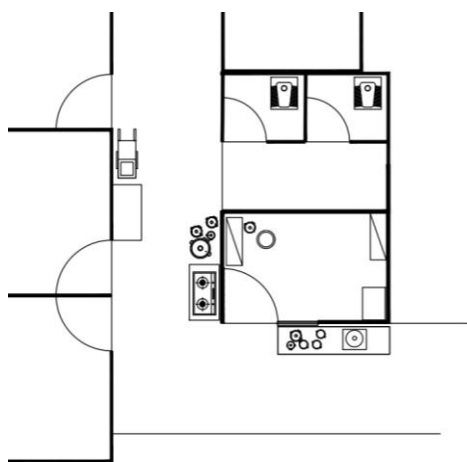


Gambar 4. Responden 1, Kasus Penambahan Dapur
Sumber: Analisa Penulis, 2022

Secara umum, warga Kampung Muka meletakkan dapur mereka pada jalan di bagian depan rumah, namun hal ini hanya dapat dilakukan apabila kondisi memungkinkan. Kondisi jalan yang paling mempengaruhi adalah lebar jalan, warga baru akan menggunakan jalan sebagai bagian dapur mereka apabila mereka yakin dapur tidak akan menutupi jalan atau mengganggu aktivitas publik. Apabila jalan di depan rumah mereka tidak cukup

memadai dan ekstensi hunian tidak dapat dilakukan, penghuni akan mengekstensi sebagian lain dari hunian seperti di bagian samping atau depan rumahnya. Pada beberapa kasus, warga bahkan meletakkan dapur pada bagian jalan yang tidak bersinggungan langsung dengan hunian selama tidak menutupi jalan. Bila hunian memiliki lebih dari satu sisi yang bersinggungan dengan ruang publik yang memadai, maka warga akan menggunakan seluruh sisi yang tersedia sebagai ekstensi huniannya seperti yang terjadi pada responden 2 di gambar 5.

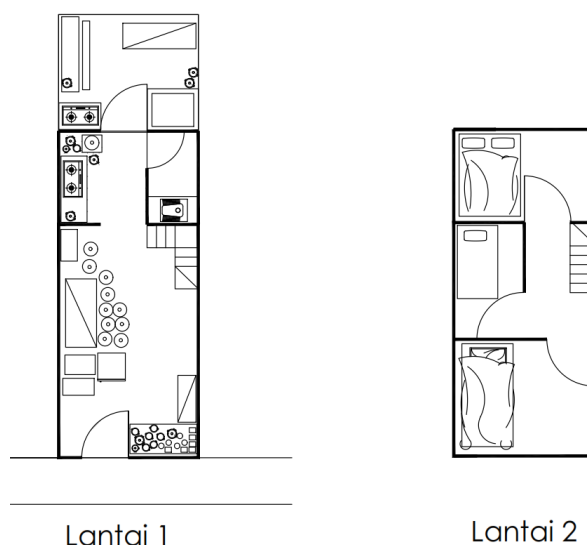
Berikutnya, ditemukan alasan peletakan dapur di bagian luar hunian adalah sebagai penanda dari jenis usaha HBE. Pada kegiatan HBE yang berkaitan dengan berjualan makanan (*processed food*), maka dapur yang dibuat di depan rumah menjadi penanda kegiatan jual-beli, hal ini dianggap sangat berguna untuk menarik pembeli, dibandingkan dapur yang berada di dalam rumah. Pada contoh kasus responden 3 pada gambar 6, hunian telah memiliki dapur di bagian dalam rumah, ukuran rumah pun cukup luas apabila ingin menambahkan atau memperluas bagian dapur. Namun penghuni memilih menambahkan dapur pada bagian luar rumah sebagai penanda bahwa penghuni berjualan makanan.



Gambar 5. Responden 2, Kasus Penambahan Dapur di Kedua Sisi Hunian
Sumber: Analisa Penulis, 2022

Sedangkan pada hunian dengan HBE yang tidak bersinggungan dengan memasak makanan, peletakan dapur di luar rumah tidak secara

langsung dipengaruhi oleh HBE. Namun, terdapat kemungkinan dimana ruang dalam hunian digunakan untuk kegiatan HBE lain sehingga tidak ada ruang sisa didalam rumah untuk peletakan dapur. Seperti pada rumah tangga yang menjalankan usaha kerajinan tangan, bagian dalam rumah cenderung penuh untuk menyimpan bahan baku dan peralatan. Saat dihadapkan pada pilihan untuk menempatkan dapur atau bahan baku usaha di luar rumah, penduduk memilih dapur, dikarenakan bahan baku dapat dengan mudah dicuri bila ditempatkan di luar rumah tanpa pengawasan.



Gambar 6. Responden 3, Kasus Penambahan Dapur sebagai Penanda HBE
Sumber: Analisa Penulis, 2022

Sebagian warga berpendapat bahwa peletakan dapur di luar rumah juga dapat menjadi pencegahan musibah kebakaran. Bila terjadi kebakaran pada dapur yang berada diluar rumah, tetangga sekitar dapat dengan cepat mengetahui dan membantu memadamkan api. Dapur di bagian dalam juga lebih berisiko menyulut kebakaran karena api dapat cepat menyebar pada ruangan kecil yang penuh furnitur. Hal ini sangat masuk akal mengingat di Kampung Muka telah beberapa kali terjadi kebakaran, sehingga dapat dipahami bila keamanan menjadi alasan yang penting bagi warga.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pertambahan kepadatan penduduk kota yang kian pesat tidak diiringi oleh kemampuan sektor formal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu komunitas terdampak adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang menghuni kampung kota. Sehingga mereka dipaksa untuk bergantung pada sektor informal untuk bertahan hidup, salah satunya dengan menjalankan HBE.

Secara umum, hunian pada kampung kota memiliki luasan yang sangat terbatas. Adanya kegiatan HBE semakin memaksa masyarakat untuk cerdas dalam melakukan adaptasi meruang. Pada dasarnya terdapat banyak jenis adaptasi meruang yang dapat dilakukan untuk mewadahi kegiatan HBE, seperti: *adaptation strategy by sharing*; *adaptation strategy by extending*; dan *adaptation strategy by shifting*.

Dalam mengamati pelaku HBE Kampung Muka, yang melakukan usaha menjual makanan dimana dapur menjadi kebutuhan mendasar, para penghuni melakukan kecenderungan dalam adaptasi ruang servis dengan bentuk ekstensi ruang huniannya. Terdapat sebuah keunikan dimana masyarakat seolah sepakat secara teratur meletakkan dapur di daerah lorong di depan rumahnya masing-masing. Dalam ketidakteraturan pembangunan hunian informal di Kampung, kekompakan masyarakat ini memunculkan semacam aturan tidak tertulis. Studi ini mengidentifikasi beberapa alasan mengapa warga meletakkan dapur pada bagian luar dan mengokupansi jalanan/ruang publik.

Alasan utama warga meletakkan dapur dibagian depan rumah adalah apabila tidak memungkinkan membuat dapur di dalam rumah. Hal ini dilakukan pada hunian yang memiliki luasan cenderung kecil. Memaksa meletakkan dapur di dalam rumah dapat memakan sebagian besar ruangan. Kemudian, sebagian besar ekstensi dapur diletakkan di bagian depan jalan. Namun, dapur baru dapat diletakkan di jalan depan rumah apabila lebar jalan memungkinkan, sehingga dapur tidak menutupi jalan orang lain atau mengganggu aktivitas penggunaan jalan publik. Apabila jalan di depan rumah tidak memadai, maka ekstensi tidak memungkinkan untuk dilakukan. Beberapa penghuni pada akhirnya melakukan ekstensi di

bagian lain rumah yang memungkinkan seperti di belakang atau di samping rumah. Alasan berikutnya mengapa dapur diletakkan di luar adalah jenis usaha HBE. Apabila HBE yang dilakukan penghuni berupa kegiatan berjualan makanan, maka dapur yang diletakkan di luar dapat berperan sebagai penanda kegiatan. Selain itu, perletakan dapur di luar rumah juga dapat menjadi pencegahan musibah kebakaran. Bila terjadi kebakaran, warga sekitar dapat lebih cepat menyadari dan mengatasinya, dibandingkan jika dapur terletak di dalam rumah.

Hal ini kemudian menjadi penting bagi acuan desain perumahan sederhana atau perumahan padat penduduk. Sebagaimana yang telah diungkapkan, bahwa penghuni perumahan padat penduduk tidak memiliki masalah dengan perletakan dapur yang berada di luar rumah. Berbeda dengan tipologi perumahan pada umumnya, dimana dapur seringkali berada di dalam bangunan dan tertutup dari lingkungan sebagai bentuk privasi. Perletakan dapur di luar rumah pada batas area publik, pada akhirnya menjadi sebuah preferensi dan memberikan keuntungan tersendiri bagi warga. Hal ini juga menunjukkan bahwa tiap rumah tangga akan membutuhkan dapur pribadi. Sehingga dapur komunal bukan merupakan pilihan dalam perancangan hunian bagi masyarakat menengah kebawah walaupun lahan yang ada terbatas, karena para penghuni bisa jadi membutuhkan dapurnya sebagai bagian dari penghidupan mereka.

Kemudian dapat disimpulkan juga bahwa masyarakat yang datang dari lingkungan informal terbiasa memiliki kebebasan mengubah dan memodifikasi huniannya. Mereka cenderung bersikap fleksibel dalam memperlakukan ruang milik pribadi dan ruang publik. Batas antara ruang publik dan hak milik pribadi menjadi kabur saat digunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Sehingga dalam perencanaan hunian yang diperuntukan mewadahi masyarakat dari kalangan ini haruslah memperhatikan kebiasaan ini. Kebijakan dan aturan yang diberikan diharapkan tidak kaku dan mengikat, begitu pula peruntukan ruang yang ada. Pada proses perencanaan dan perancangannya pun sebaiknya dapat melibatkan

masyarakat dari kelompok sasaran agar tidak terjadi adaptasi ruang yang kemudian menghasilkan kekacauan dalam tatanan ruang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adianto, J., & Gabe, R. T (2020) *Home-Based Enterprise and Its Impediment Factors to Self-Help House Improvement in Kampong Cikini, Jakarta*, International Journal of Built Environment and Scientific Research, 4(1), 49. <https://doi.org/10.24853/ijbesr.4.1.49-60>
- Dovey, K (2012) *Informal Urbanism and Complex Adaptive Assemblage*, International Development Planning Review, 34(4), 349–367. <https://doi.org/10.3828/idpr.2012.23>
- Ezeadichie, N (2012) *Home-based Enterprises in Urban space: Obligation for Strategic Planning?* Berkeley Planning Journal, 25(1), 44–63, <https://doi.org/10.5070/bp325112010>
- Huba, N., & Yohannes, K (2015) *Space Use and Environmental Effects of Home-Based Enterprises*, The Case of Buguruni Mnyamani Informal Settlement, Dar Es Salaam, Tanzania. International Journal of Humanities and Social Science, 5(4), 118–119.
- Gough, K. V., Tipple, A. G., & Napier, M (2003) *Making a Living in African Cities: The Role of Home-based Enterprises in Accra and Pretoria*, International Planning Studies, 8(4), 253–277, <https://doi.org/10.1080/1356347032000153115>
- Jones, P (2021) *Distance and Proximity Matters: Understanding Housing Transformation through Micro-morphology in Informal Settlements*, International Journal of Housing Policy, 21(2), 169–195, <https://doi.org/10.1080/19491247.2020.1818052>
- Jones, P (2019) *The Shaping of Form and Structure in Informal Settlements: A Case Study of Order and Rules in Lebak Siliwangi, Bandung, Indonesia*, Journal of Regional and City Planning, 30(1), 43–61, <https://doi.org/10.5614/jpwk.2019.30.1.4>
- Lawanson, T (2012) *Poverty, Home Based Enterprises and Urban Livelihoods in the Lagos Metropolis*, Journal of Sustainable Development in Africa, 14(4), 158-171.
- Marsoyo, A (2012) *Constructing Spatial Kapital: Household Adaptation Strategies in Home Based Enterprises in Yogyakarta*, School of Architecture, Planning and Landscape Faculty of Humanities and Social Sciences University of Newcastle Upon Tyne
- Mpembamoto, K., Nchito, W., Siame, G., & Wragg, E (2017) *Impact of Sector-based Upgrading on Home-based Enterprises: A Case Study of Chaisa Settlement*, Environment and Urbanization, 29(2), 597–614, <https://doi.org/10.1177/0956247817701087>
- Suhartini, N., & Jones, P (2020) *Better Understanding Self-organizing Cities: A Typology of Order and Rules in Informal Settlements*, Journal of Regional and City Planning, 31(3), 237–263. <https://doi.org/10.5614/jpwk.2020.31.3.2>
- Tipple, G (2005a) *The Place of Home-based Enterprises in the Informal Sector: Evidence from Cochabamba, New Delhi, Surabaya and Pretoria*, Urban Studies, 42(4), 611–632, <https://doi.org/10.1080/00420980500060178>
- Tipple, G (2005b) *Pollution and Waste Production in Home-based Enterprises in Developing Countries: Perceptions and Realities*, Journal of Environmental Planning and Management, 48(2), 275–299. <https://doi.org/10.1080/0964056042000338181>
- UN/DESA (2018) *The World's Cities in 2018*, World Urbanization Prospects: The 2018 Revision, 34.
- UNESCAP (2015) *The State of Asian and Pacific Cities 2015*, Nairobi, Kenya.
- UN-Habitat (2015) *Habitat III Issue Paper 22 - Informal Settlements*, Nairobi, Kenya.
- UN-Habitat (2016) *Slum Almanac 2015/2016 – Tracking the Lives of Slum Dwellers*, UN-Habitat, Nairobi, Kenya, 10-45.
-